

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan Literatur, yang sering disebut sebagai Tinjauan Pustaka, melibatkan penyusunan ringkasan tertulis mengenai jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang memaparkan teori serta informasi terkini maupun yang terkait dengan masa lalu. Ini melibatkan pengorganisasian sumber-sumber berdasarkan topik dan dokumentasi yang diperlukan untuk menyusun proposal penelitian. (Mardiastuti, 2022).

Bagian tinjauan literatur ini mengandung temuan dari penelitian sebelumnya serta teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian yang dipilih oleh peneliti:

Review pertama dari Johni Robert Verianto Korwa berjudul “**Kebangkitan China melalui *Belt and Road Initiative* dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia.**” (Korwa, 2019). Permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah kebangkitan China yang malah mengancam keberadaan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan menggeser sistem Westphalia. Disini penulis menggunakan metode *tianxia* dalam melihat China dengan konsep filosofis China bernama “*All Under Heaven*” dimana metode cukup jarang digunakan. Penelitian ini menghasilkan bahwa kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) dinilai bukan hanya sekedar program namun ini merupakan sebuah inisiatif yang dibuat oleh pemimpin China saat ini yaitu Xi Jinping guna memperluas jalur perdagangan dan instrumen yang diluncurkan demi mensupport kebangkitan China pada abad kedua puluh satu. Sementara itu para akademis dan

media berpendapat bahwa program *Belt and Road Initiative* (BRI) ini sebagai '*Chinese Marshall Plan*' yang mana ini serupa dengan program ekonomi Amerika Serikat '*Marshall Plan*' yang dibuat setelah Perang Dunia II. Mengenai hal ini pemerintah China menolak analogi tersebut karena mereka menilai *Belt Road Initiative* (BRI) berbeda dengan '*Marshall Plan*' secara ukuran dan ambisinya, dimana China the menginvestasi sekitar \$900 miliar untuk program *Belt Road Initiative* (BRI) nya, sedangkan biaya *Marshall Plan* milik Amerika Serikat sebesar \$12 miliar di tahun 1948 dan sekitar \$130 miliar di tahun 2015. Program *Belt and Road Initiative* (BRI) ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping Ketika ia mengunjungi Kazakhstan dan Indonesia, dan di tahun 2013 pada pidatonya ia menyarankan China dan negara Eurasia untuk melakukan kerjasama dalam proyek Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (*The Silk Road Economic Belt*) yang tujuannya membangun koneksi darat yang menghubungkan China dan Asia Tenggara ke Eropa Barat. Dalam konteks *tianxia* ini, penulis berpendapat bahwa kebangkitan China ini pasti akan terjadi tanpa adanya konflik yang akan terjadi mengingat angka GDP China yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang tanpa diragukan China akan mampu menggeser posisi Amerika Serikat. Justifikasi pembeda antara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat adalah literatur ini membahas bahwa adanya Kebangkitan China yang membuat adanya (Re)Konstruksi Hubungan Internasional di Sistem Westphalia atau sistem barat, sedangkan penelitian saya akan membahas tentang Kebangkitan Ekonomi China melalui *Belt and Road Initiative* oleh Xi Jinping.

Review kedua ada dari Nur Fajar Absor, Wahyudin, Arief Hidayat, Rahayu Permana berjudul "**Kebangkitan Tiongkok sebagai Raksasa Baru Dunia Tahun**

1976-2013” (Absor et al., 2022). Permasalahan yang diangkat peneliti ini adalah kebijakan apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dan Hu Jintao sebagai pemimpin China sebelum Xi Jinping sehingga Tiongkok bisa menjadi salah satu raksasa dunia. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; dan (4) historiografi. Heuristik yaitu mengumpulkan dokumen yang relevan dengan judul, Kritik yaitu melakukan pengecekan ulang menggunakan data yang telah dikumpulkan, Interpretasi yaitu menafsirkan terhadap sumber-sumber yang telah diverifikasi, dan Historiografi yaitu menulis sejarah berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Deng Xiaoping mengeluarkan kebijakan ‘Empat Modernisasi’ yang mencakup atas bidang pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan pertahanan nasional (1976-1980). Ini menggantikan gagasan ‘Revolusi Kebudayaan’ Mao Zedong. Kebijakan ini berdampak terus terhadap naiknya pendapatan perkapita China sebesar 9% dan membuat China mulai bangkit perlahan secara bidang perekonomian. Kemudian pemimpin selanjutnya yaitu Hu Jintao banyak melakukan pergerakan salah satunya membentuk *ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)* dan BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan disusul Afrika Selatan), dan disini juga menunjukkan bahwa China telah mencapai kemakmuran. Saat itu Hu Jintao meneruskan kebijakan *Western Development Strategy (WDS)* Jiang Zemin untuk pemerataan pembangunan bagian Barat di Tiongkok. Reformasi Pendidikan yang Hu Jintao buat bertumpu kepada tiga kebijakan: (1) meningkatkan kualitas Pendidikan melalui perbaikan mutu sekolah; (2) mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung layanan Pendidikan; dan (3) mengurangi disparitas Pendidikan dengan pemerataan dan

memperluas akses Pendidikan di wilayah pedesaan. Ciri khas dari kepemimpinan Hu Jintao ini adalah “Konsep Pengembangan Ilmu Pengetahuan”. Kebijakan yang dibuat oleh Hu Jintao ini berdampak kepada perkembangan perekonomian Tiongkok hingga pertumbuhan ekonominya mencapai dua digit. Tiongkok juga menunjukkan kehebatannya salah satunya dalam Olimpiade Beijing 2008 dan mengantongi lima puluh satu medali emas mengalahkan Amerika Serikat dan Rusia. Justifikasi pembeda antara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat adalah literatur ini membahas China menjadi raksasa baru di tahun 1976-2013, sedangkan penelitian saya akan membahas Kebangkitan Ekonomi China di tahun 2019-2022.

Review ketiga dari Siti Nadjiha Hariri yang berjudul “**Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh Di Kawasan Asia Pasifik**” (Hariri, 2020). Permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah apa yang membuat negara China dan Australia terjadi perebutan pengaruh di Kawasan Asia Pasifik ini. Mengingat besarnya pengaruh China di Kawasan Asia Pasifik ini membuat Australia yang dinilai sebagai negara terkuat di Kawasan tersebut merasa terancam dengan masuknya China, sehingga pada akhirnya timbul lah sebuah persaingan antara kedua negara ini Kawasan Asia Pasifik. Hasil dari review yang dilakukan oleh peneliti berupa Australia adalah negara adikuasa di kawasan Pasifik dan bersedia memberikan bantuan berupa keamanan, perekonomian, dll kepada negara di Pasifik dengan maksud agar Pasifik aman secara strategis, berekonomi yang stabil, dan berdaulat secara politis. Salah satu upaya Australia dalam pencapaian keamanan dengan *South Pasific Forum* (SPF) yang kemudian berganti nama menjadi *Pasific Island Forum* (PIF) yang berisi semua negara Pasifik. Adanya kerjasama dengan *Pacific Patrol Boat Program* (PPBP) yang merupakan bantuan program

peningkatan kemampuan kepolisian sebagai bentuk penguatan sektor nasional negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, disini Australia bekerja sama untuk melindungi area yang dianggap memiliki nilai strategis. Australia akan tetap memikul tanggung jawab atas keamanan Pasifik Selatan dan tetap menjadi mitra penting bagi sejumlah negara di Kawasan Asia-Pasifik ini. Australia juga berusaha melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian di Kepulauan Solomon, Australia mendirikan misi bantuan yaitu *Regional Assistance Mission To Solomon Island* (RAMSI) melalui inilah Australia melakukan intervensi kemanusiaan. Konflik yang terjadi ini membuat Kepulauan Solomon menjadi tidak stabil, dan China masuk menawarkan bantuan ekonomi untuk mendukung kebijakan “*One China Policy*”, namun upaya China ini malah memperburuk keadaan. Kemudian China masuk kembali dengan proyek bantuannya di kawasan Pasifik yang sontak membuat Australia khawatir bahkan merasa terancam karena pasti China memiliki kepentingan salah satunya adalah membangun pangkalan militer di Pasifik. China akan berusaha untuk membangun pengaruh, jelas ini sangat mengganggu keberadaan Australia. Disisi lain Australia terus menyuplai bantuan biaya seperti biasanya dengan maksud untuk menangkal pengaruh China di kawasan Pasifik, maka inilah penyebab utama timbulnya persaingan antara China dan Australia di Kawasan Asia Pasifik. Justifikasi pembeda antara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat adalah literatur ini membahas tentang adanya Kebangkitan China di Kawasan Asia Pasifik sehingga mengancam salah satu negara di Kawasan tersebut yaitu Australia, sedangkan penelitian saya akan membahas tentang Kebangkitan China di dunia internasional yang mungkin akan mengancam beberapa negara di dunia.

Review keempat dari peneliti Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, dan Herdho Husna Akmala dengan judul “**Konstruksi Ide Xi Jinping Dalam *Belt and Road Initiative***” (Darmawan et al., 2022). Permasalahan yang diangkat penulis kali ini adalah apa yang membuat ide dan persepsi Xi Jinping tentang program *Belt and Road Initiative* ini dinilai cukup membuat beberapa negara di dunia khawatir karena inisiatif ini guna menyebarkan efek China di mata dunia. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan konstruktivisme. Topik ini membahas tentang konstruksi ide dari pemimpin China yaitu Xi Jinping dimana ia membuat sebuah kebijakan ambisius seperti *Belt and Road Initiative* dimana kebijakan ini cukup mengundang perhatian negara di dunia bahkan mendapatkan respon positif serta negatif. Hasil dari penelitian adalah ide dan persepsi yang dibuat oleh Xi Jinping tentang program *Belt and Road Initiative* ini dinilai berhasil membuat China bangkit di mata dunia dan ini bisa menjadi sebuah pendorong bagi China dalam menentukan karakteristik politik luar negeri negaranya, inisiatif ini dinilai seperti kontrol terhadap politik luar negeri lain dimana China disini berfokus memperluas jalur sutra darat maupun laut. Xi Jinping berharap China akan menjadi negara sosialis modern yang sejahtera di tahun 2049. Dalam hal inipun Xi Jinping menawarkan ide *the Chinese Dream* yang didasarkan akibat trauma masa lalu. Pengumuman tentang program *Belt and Road Initiative* (BRI) ini bersepakat untuk berkomitmen “*to build open economy, ensure free and inclusive trade, oppose all forms of protectionism including in the framework of the Belt and Road Initiative*” dimana Xi Jinping menfokuskan kepada tiga bidang, yaitu pembangunan industrial, integrasi dan reformasi keuangan, serta pengembangan infrastruktur. Sejauh ini program *Belt and Road Initiative* masih dianggap berita

bahagia bagi sebagian negara di dunia, namun tidak sedikit juga negara merasakan kekhawatiran yang cukup besar karena jikalau China mengalami keruntuhan maka akan menghancurkan suplai ekonomi serta keamanan untuk negara lain di dunia. Justifikasi pembeda antara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat adalah literatur ini membahas tentang adanya konstruksi ide baru dari Xi Jinping berupa *Belt and Road Initiative*, sedangkan dalam penelitian saya akan membahas Kebangkitan China melalui *Belt and Road Initiative* yang tak lain merupakan kebijakan ambisius yang dikeluarkan oleh Xi Jinping, disini saya akan membahas lebih kepada individu seorang Xi Jinping sendiri.

Review kelima penulis Gerald Theodorus L.Toruan dengan jurnal berjudul **“Kebijakan *Belt and Road Initiative* Sebagai Alat Soft Power Cina Dalam Membangun Hegemoni Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus : Investasi Cina di Indonesia)”** (Toruan, 2021). Permasalahan yang diangkat oleh penulis di jurnal ini adalah apa yang membuat China akhirnya ingin menarik simpati dari negara Asia Tenggara bahkan China berniat untuk memperluas jalur sutra di Kawasan ini. Topik ini membahas tentang strategi China dalam menarik simpati negara di Kawasan Asia Tenggara dengan cara berinvestasi dengan salah satu negara di Kawasan tersebut yaitu Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah adanya upaya China dalam menarik simpati dari negara Asia Tenggara yang mana dengan maksud untuk menandingi negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang sudah lebih dulu menanamkan hegemoninya di Asia Tenggara. Di tahun 2016, CEO HSBC Malaysia mengatakan bahwa inisiatif China telah menghasilkan investasi sebesar \$1,77 miliar dalam pembentukan 300 perusahaan China yang

didistribusikan ke delapan negara ASEAN dengan dua puluh enam zona kerjasama ekonomi. Alasan kuat China ingin menguasai Kawasan Asia Tenggara ini karena Kawasan yang berkembang pesat ini menawarkan tenaga kerja murah yang akan menarik perhatian industri negara tirai bambu ini, China melihat ada peluang besar untuk membangun infrastruktur di Asia Tenggara. Salah satu negara yang mendapatkan perhatian pertama China di Asia Tenggara adalah Indonesia, dimana negara ini memiliki perekonomian terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia-lah Xi Jinping mengumumkan *Maritime Silk Road*. Indonesia dipilih China karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan membuat China tertarik untuk menanamkan investasi. Penawaran investasi China ini dinilai akan mendukung Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia dengan pembangunan Pelabuhan serta tol laut. Respon dari Indonesia sendiri adalah Presiden Joko Widodo menilai investasi China tidaklah salah dimana pemerataan pembangunan bisa dilakukan melalui investasi China ini, namun kerjasama kedua negara ini tetap harus mengutamakan kedaulatan negara. Di sisi lain dengan adanya program *Belt and Road Initiative* (BRI) China juga ingin menghilangkan stigma komunis yang sudah tertanam dalam negara China dan merekonstruksi ulang dengan melakukan kerjasama. Justifikasi pembeda antara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat adalah literatur ini membahas tentang bagaimana *Belt and Road Initiative* dijadikan alat *soft power* bagi China membangun hegemoni di Kawasan Asia Tenggara salah satunya dengan cara berinvestasi kepada Indonesia, sedangkan penelitian saya akan membahas tentang bagaimana perekonomian China ini bangkit melalui kebijakan ambius Xi Jinping yaitu *Belt and Road Initiative* di dunia internasional.

Review keenam dengan penulis Dinda Ayuningtyas dan Ramdhan Muhaimin dengan jurnal berjudul “**Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Kebangkitan Tiongkok Sebagai Ancaman Bagi Kawasan Indo-Pasifik**” (Ayuningtyas & Muhaimin, 2022). Permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah apa yang membuat Indonesia sehingga akhirnya membuat sebuah strategi untuk menghadapi kebangkitan China di Kawasan Indo-Pasifik. Topik ini membahas tentang bagaimana kebangkitan China akhirnya malah membuat sebuah ancaman bagi sebuah Kawasan dan membuat negara-negara yang berada di Kawasan tersebut memiliki kekhawatiran yang cukup besar dan perlunya negara-negara tersebut membuat sebuah strategi untuk menghadapi kebangkitan China yang sedang terjadi saat ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teori sekuritisasi *Copenhagen School*, menurut Barry Buzan teori sekuritisasi ini adalah sebuah pengidentifikasian sebuah isu yang sedang terjadi untuk bisa dijadikan sebagai agenda keamanan. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya megaprojek *Belt and Road Initiative* (BRI) China sekarang mampu menjadi kekuatan global. Setelah reformasi kebijakan ekonomi oleh Deng Xiaoping, pertumbuhan ekonomi China meningkat pesat. Dari tahun 1978 hingga 2017, PDB China meningkat dari \$175 miliar menjadi \$14 triliun. China juga menolak bahwa proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) ini disebut sebuah ‘strategi’ karena menurut China program ini adalah sebuah terobosan ekonomi China. Program ini menandakan adanya kebangkitan China di abad 21 ini, dan disini adanya upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian di wilayah tersebut menunjukkan peran penting Indonesia dalam mengelola *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, selain itu Indonesia terus meningkatkan anggaran pertahanannya untuk memperkuat

keamanan wilayahnya dan mencapai kepentingan nasional Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh rencana skema anggaran pertahanan *Minimum Essential Force* (MEF), serta untuk menyelesaikan konflik dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia mengeluarkan peta NKRI pada tahun 2017. Ini dilakukan karena wilayah Indo-Pasifik memiliki banyak konstelasi politik kepentingan dan Kawasan ini merupakan pusat tatanan dunia. Justifikasi pembeda antara jurnal ini dengan penelitian yang saya buat adalah literatur ini membahas tentang adanya Kebangkitan China di Kawasan Asia Pasifik dan Indonesia membuat sebuah strategi dalam menghadapi Kebangkitan China ini, sedangkan penelitian saya akan membahas tentang Kebangkitan China di dunia internasional yang mungkin akan mengancam beberapa negara di dunia.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Teori	Masalah	Kesimpulan
1	Kebangkitan China melalui <i>Belt and Road Initiative</i> dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. Johni Robert Verianto Korwa (2019)	Menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri, Teori Kerjasama Internasional, Teori <i>Development State</i> , Teori Kepentingan Nasional	Mengapa Kebangkitan China yang malah mengancam keberadaan negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan malah menggeser sistem Westphalia ?	Karena kebangkitan China ini secara tidak langsung menggeser keberadaan Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan besar di dunia dan dinilai lebih berimplikasi kepada rekonstruksi dunia hubungan internasional bukan kepada sistem Westphalia.

2	Kebangkitan Tiongkok sebagai Raksasa Baru Dunia Tahun 1976-2013. Nur Fajar Absor, Wahyudin, Arief Hidayat, Rahayu Permana (2022)	Menggunakan Teori Konfusianisme, Teori Modernitas, Teori Sosialisme, Teori Komunisme,	Kebijakan apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dan Hu Jintao sehingga Tiongkok bisa menjadi salah satu raksasa dunia ?	Bangkitnya Tiongkok sebagai raksasa baru dunia dicapai dengan proses yang cukup panjang dan naik turun, tidak lepas juga dari kebijakan para pemimpin Tiongkok sebelumnya hingga akhirnya Tiongkok berambisi untuk menjadi negara adidaya dunia menggeserkan posisi Amerika Serikat.
3.	Persaingan China-Australia Dalam Perebutan Pengaruh Di Kawasan Asia Pasifik. Siti Nadjiha Hariri (2020)	Menggunakan Teori <i>National Interest</i> , Teori <i>Development State</i> , Teori Sekuritisasi	Apa yang membuat Australia merasa terancam dengan masuknya China ke Asia Pasifik ?	Adanya peningkatan peran China di Kawasan Asia Pasifik ditandai dengan investasi dan memberikan dana bantuan luar negeri dalam jumlah besar.
4	Konstruksi Ide Xi Jinping Dalam <i>Belt and Road Initiative</i> . Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala (2022)	Menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri, Teori Politik Luar Negeri, Teori Diplomasi Ekonomi	Mengapa program <i>Belt and Road Initiative</i> yang dibuat Xi Jinping dinilai cukup membuat beberapa negara di dunia khawatir ?	Kebijakan Luar Negeri yang dibuat oleh Xi Jinping untuk membuat perekonomian China bangkit dinilai cukup membuat banyak negara besar yang khawatir karena ini bisa menggeser posisi mereka seperti Amerika Serikat.
5	Kebijakan <i>Belt and Road</i>	Menggunakan Teori Kebijakan	Apa yang membuat	Xi Jinping ingin menanamkan

	<i>Initiative</i> Sebagai Alat Soft Power Cina Dalam Membangun Hegemoni Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus : Investasi Cina di Indonesia). Gerald Theodorus L.Toruan (2021)	Luar Negeri, Teori <i>National Interest</i>	Cina akhirnya ingin menarik simpati dari negara Asia Tenggara bahkan berniat untuk memperluas jalur sutra di Kawasan ini ?	hegemoninya di Kawasan Asia Tenggara dengan program <i>Belt Road Initiative</i> -nya. China ingin merubah pandangan dunia dan mencoba merebut status <i>super power</i> baru di dunia.
6	Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Kebangkitan Tiongkok Sebagai Ancaman Bagi Kawasan Indo-Pasifik. Dinda Ayuningtyas dan Ramdhan Muhaimin (2022)	Menggunakan Teori <i>Foreign Policy</i> , Teori Integrasi Regional, Teori Sekuritisasi, Teori Diplomasi	Apa yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi kebangkitan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik ?	Indonesia melakukan untuk menghadapi Tiongkok ini dengan melalui <i>Asean Outlook on Indo-Pasific</i> , peningkatan anggaran <i>Minimum Essential Force</i> , dan menerbitkan pembaruan peta NKRI tahun 2017. Hal ini dilakukan Indonesia guna mempersiapkan diri dari ancaman kedamaian di Kawasan Indo-Pasifik.

2.2. Kerangka Teoritis

Dalam mempermudah serta untuk memperkuat penyusunan penelitian ini, diperlukan kerangka teoritis yang sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Tujuan dari kerangka teoritis ini, yaitu kerangka dasar teori yang berfungsi

sebagai landasan penelitian sehingga mampu memberikan jawaban teoritis terhadap permasalahan.

2.2.1. *National Interest*

National Interest atau Kepentingan Nasional yaitu tujuan serta ambisi sebuah negara, baik secara ekonomi, militer, ataupun budaya. Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional dapat didefinisikan secara normatif dan deskriptif. Dimana secara normatif, kepentingan nasional didefinisikan sebagai sebuah kumpulan prinsip sebuah bangsa yang berusaha untuk dicapai dengan menjalin hubungan dengan negara lain, dan secara deskriptif kepentingan nasional didefinisikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh sebuah bangsa melalui pemimpin pemerintahan secara konsisten (Minati, 2018).

Dalam studi Hubungan Internasional, konsep ini dianggap cukup penting karena sebagai dasar hubungan internasional sebuah negara. Kepentingan nasional ini sangat terkait dengan *power* negara sebagai tujuan dan alat, terutama kekuatan yang destruktif (*hard power*). Kepentingan nasional adalah ide paling umum ketika berbicara tentang hubungan internasional. Selain itu, konsep ini digunakan untuk menjelaskan cara sebuah negara berinteraksi dengan dunia internasional. Ketika kepentingan nasional mengejar kekuasaan dan memanfaatkannya sebagai alat untuk mencapai kepentingannya sendiri, hal itu menimbulkan anarki dalam sistem internasional, dan tanpa kepentingan nasional, konflik, perang, dan perimbangan kekuasaan muncul (Bainus & Rachman, 2018).

Kepentingan nasional dalam sebuah negara merupakan komponen negara yang paling penting, seperti pertahanan, keamanan, kekuatan angkatan bersenjata,

dan kesejahteraan ekonomi. Pembuat keputusan nasional akan didorong oleh kepentingan nasional ini untuk membuat kebijakan internasional mereka sendiri, kepentingan nasional ini dapat dianggap sebagai tujuan utama dan faktor penentu akhir (Yani & Perwita, 2005). Perilaku politik luar negeri negara didefinisikan dalam konsep kepentingan nasional. Menurut T. May Rudy, kepentingan nasional adalah:

“Tujuan yang ingin dicapai yang terkait dengan aspirasi yang telah diinginkan dikenal sebagai Kepentingan Nasional. Bagi setiap negara atau bangsa, Kepentingan Nasional mereka mencakup dua aspek utama: keamanan, yang melibatkan perlindungan rakyat dan wilayah mereka, dan kemakmuran. Kedua elemen ini menjadi dasar dalam perumusan dan penentuan Kepentingan Nasional negara tersebut.” (Rudy, 2002).

Menurut Miroslav Nincic, tiga asumsi utama membentuk definisi kepentingan nasional: Pertama, kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencapainya. Kedua, pencapaian kepentingan nasional harus dipengaruhi oleh situasi internasional. Ketiga, kepentingan nasional harus melebihi kepentingan pribadi individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi perhatian umum (Jemadu, 2008).

Menurut Scott Burchill, sebuah negara menjalankan kebijakan luar negerinya akan berdasarkan kepada kepentingan nasional negaranya. Selain itu menurut Charles Bread, negara akan menjalankan hubungan internasional berdasarkan kepentingan nasional. Dengan kata lain, konsep kepentingan nasional digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis alasan, dorongan, atau justifikasi utama yang mendorong suatu negara untuk berperilaku atau bertindak

terhadap negara lain dalam hubungannya. Morgenthau membagi kepentingan nasional menjadi dua kategori, Yang pertama adalah kepentingan nasional primer, yang berarti mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya suatu negara, serta keamanan dan keberlangsungan hidupnya. Kedua adalah kepentingan nasional sekunder yang dimaksudkan untuk mempertahankan keamanan dan keberlangsungan hidup suatu negara. Untuk memenuhi kepentingan nasional primer, sebuah negara tidak akan ragu untuk berperang, sedangkan kepentingan nasional sekunder adalah kepentingan yang masih dapat dinegosiasikan. (Bakry, 2017).

2.2.2. Foreign Policy

Foreign Policy atau Kebijakan Luar Negeri, pertama kali diusulkan oleh K.J. Holsti, dijelaskan dalam teorinya sebagai sebuah konsep dan ide yang bertujuan untuk merumuskan solusi terhadap masalah atau menginisiasi perubahan dalam suatu wilayah. Karena setiap negara memiliki tujuan dan kebijakan yang berbeda, maka kebijakan luar negeri setiap negara haruslah bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Dalam teori Kebijakan Luar Negeri ini terdapat tiga teori yang menjelaskan mengapa suatu negara harus melaksanakan Kebijakan Luar Negeri nya : (Holsti, 1983)

- Salah satu elemen kunci dalam perumusan kebijakan luar negeri adalah tujuan negara, karena kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan negara tersebut.

- Dalam pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri, pentingnya mempertimbangkan unsur waktu karena hal ini akan memengaruhi kemampuan mencapai target dan tujuan yang ditetapkan.
- Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara anggota pada saat yang telah disepakati adalah berbagai jenis tuntutan tujuan.
- Negara, ketika merancang dan melaksanakan Kebijakan Luar Negeri, memiliki dasar, asumsi, dan tujuan tertentu yang dipertimbangkan dengan memperhatikan keamanan nasional. Kebijakan Luar Negeri bergantung pada pandangan, sikap, keputusan, dan tindakan negara lain, dengan pertimbangan yang sesuai.

Kebijakan Luar Negeri melibatkan prinsip, tindakan, strategi, metode, kesepakatan, arahan, dan lain-lain. Ini berarti bahwa pemerintah nasional melakukan hubungan internasional dengan organisasi internasional dan juga dengan aktor non-pemerintah (Jackson & Sorensen, 2016). Dalam mempelajari konsep Kebijakan Luar Negeri memerlukan pengetahuan tentang *action theory* atau kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah mereka sendiri sebagai upaya dalam tercapainya kepentingan nasional. Konsep yang dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani yaitu :

"Secara umum, kebijakan luar negeri adalah kombinasi nilai, sikap, dan tujuan untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dunia internasional. Ini pada dasarnya ini merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga untuk menentukan keterlibatan suatu negara dalam masalah internasional atau lingkungan sekitarnya" (Yani & Perwita, 2005: 47)

Rosenau dalam buku berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional dengan penulis Perwita dan Yani mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian serta situasi di luar negaranya, yaitu : (Yani & Perwita, 2005: 55)

- Kebijakan Luar Negeri diartikan sebagai sekumpulan orientasi (*as cluster of orientation*) dan pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi situasi eksternal yang menuntut mereka untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan orientasi tersebut.
- Kebijakan Luar Negeri didefinisikan sebagai strategi atau rencana dalam bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai rencana dan komitmen yang dibuat oleh pembuat keputusan untuk membuat dan mempertahankan situasi eksternal yang sesuai dengan orientasi yang mengacu pada Kebijakan Luar Negeri. Rencana Kebijakan Luar Negeri akan memberikan pedoman bagi :
 - Tindakan yang ditujukan kepada situasi yang berlangsung lama, misalnya Kebijakan Luar Negeri yang berkenaan dengan konflik Suriah.
 - Tindakan yang ditujukan kepada negara tertentu.
 - Tindakan yang diperuntukkan pada isu-isu khusus.
 - Tindakan yang berfokus pada masalah lainnya seperti isu terorisme dan isu lingkungan hidup.
- Kebijakan Luar Negeri dalam artian perilaku (*as a form of behavior*). Dalam hal ini Kebijakan Luar Negeri berada di tingkat yang lebih empiris, berupa

tindakan nyata yang diambil oleh pembuat keputusan terkait dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternal.

Proses pengambilan kebijakan luar negeri akan terjadi selama proses pengambilan keputusan kebijakan itu sendiri, menurut Graham Allison seorang ilmuwan politik Amerika Serikat ada tiga teori pendekatan tentang proses kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu : (Allison, 1971)

- *Rational Actor Model*, dalam politik internasional kebijakan luar negeri merupakan implikasi dari tindakan rasional yang dilakukan oleh para aktor. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan seperti bahwa faktanya sifat seorang individu para pembuat keputusan ini akan memungkinkan mereka untuk berbuat kesalahan, selain itu seorang pemimpin akan menghadapi tantangan rasionalitas yang berasal dari birokrasi internal dan eksternal sendiri. Pendekatan ini menjadikan bahwa para aktor rasional sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara.
- *Organizational Process Model*, dalam pendekatan ini pengambilan kebijakan luar negeri adalah suatu proses teknis yang memerlukan sejumlah tahapan, prosedur, serta mekanisme organisasi yang harus mengacu kepada prosedur kerja (*standard operating procedure*). Yang akhirnya keputusan akan dihasilkan akan mencerminkan tujuan, sasaran, serta skala prioritas organisasi. Namun, tetap saja pendekatan ini ada kelemahannya yaitu kebijakan yang berjalan akan bersifat formalistik saja, sementara dinamika yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara jelas dan rasional. Pendekatan ini akan lebih bersifat konservatif dan hanya akan melakukan perubahan kecil saja.

- *The Bureaucratic Politics Model*, di pendekatan ini pengambil kebijakan luar negeri akan melibatkan aktor yang lebih rumit dan mungkin berkelompok yang saling mempengaruhi dan menekankan kepentingan. Keputusan yang dibuat juga merupakan hasil dari proses politik yang panjang dan rumit. Di sini, para aktor akan berusaha bertindak rasional dengan mempertimbangkan tujuan negara masing-masing. Satu kelemahan dari model ini adalah bahwa para aktor tidak dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan sepenuhnya. Akibatnya, model ini mungkin lebih banyak menunjukkan egoisme para aktor.

Model dari pengambilan keputusan diatas digunakan untuk mengetahui sikap para pembuat keputusan dalam memutuskan kebijakan apa yang akan diambil dan dikeluarkan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan model *Rational Actor Model* karena dari model ini dapat menjelaskan mengenai pilihan yang akan diambil oleh sang pembuat keputusan tersebut.

2.2.3. Rational Actor Model

Salah satu konsep yang dikenal dalam pengambilan keputusan adalah *Rational Actor Model*. Teori ini menganggap bahwa kesamaan dalam pola perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pilihan-pilihan yang dibuat oleh aktor, baik itu dalam bentuk kelompok atau individu (Burch, 1980). Dalam pandangan *Rational Actor Model*, pilihan-pilihan dijelaskan sebagai produk dari proses yang rasional yang melibatkan analisis serta pedoman perilaku. Untuk memahami keputusan yang rasional, diperlukan pemahaman tentang hubungannya dengan tujuan yang dimiliki oleh pembuat keputusan tersebut. Saat mengambil keputusan, seseorang

akan berusaha merencanakan tujuan dan sasaran secara berurutan. Dalam proses ini, pengambil keputusan akan mengevaluasi semua pilihan yang ada untuk mencapai tujuan, dan akhirnya, mereka akan memilih solusi yang dapat menghasilkan hasil terbaik dengan usaha yang paling sedikit. Maka dapat dikatakan bahwa *Rational Actor Model* ini terletak kepada alasan diambilnya sebuah keputusan yang mana apa yang ingin dicapai oleh seorang individu. (Latifa, 2010)

Rational Actor Model ini diartikan sebagai *Rational Decision Making Model* dimana diasumsikan bahwa si pembuat keputusan sebagai suatu individu yang bisa berpikir rasional untuk mengambil sebuah keputusan. Menurut Allison model ini memiliki beberapa poin penting, yaitu : (Allison, 1971)

- *Goals and Objectives* adalah si pengambil keputusan mendeskripsikan setiap konsekuensi dan manfaat yang diperoleh dari setiap keputusan atau tujuan yang diambilnya, dengan tujuan untuk mengukur skala keseluruhan. Seorang pembuat keputusan harus, dalam mempertimbangkan berbagai faktor seperti keuntungan dan kegunaan, mengidentifikasi tujuan sebelum melangkah untuk menguraikan potensi hasil dari keputusan yang mereka ambil.
- *Alternatives* adalah pengambil keputusan yang memiliki berbagai alternatif yang tersedia dalam situasi tertentu, dan mereka menggunakan skema pohon keputusan untuk menggambarkan opsi-opsi ini. Skema pohon keputusan ini digunakan untuk mengubah data menjadi aturan, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah.

- *Consequences*, Pada langkah ini, alternatif-alternatif keputusan akan dianalisis untuk mengidentifikasi estimasi hambatan dan manfaat yang terkait. Dalam konteks ini, pengambil keputusan akan mengevaluasi konsekuensi *cost*, *benefit*, dan *constraints* yang relevan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- Membuat pilihan melibatkan memilih satu dari beberapa opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan negara dalam menangani suatu masalah.

2.3. Asumsi

Untuk menarik asumsi yang didasarkan kepada pemikiran dari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan kerangka teoritis yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis akan menuliskan asumsi dari penelitian ini. Asumsi merupakan landasan berpikir peneliti dalam bentuk pernyataan yang dibangun berdasarkan postulat. Maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

“Dengan Adanya Kebijakan *Belt and Road Initiative* Dari Xi Jinping Yang Digunakan Sebagai Alat Kebijakan Luar Negeri China Dalam Meningkatkan Perekonomian Menjadikan China Sebagai Salah Satu Negara Dengan Perekonomian Terkuat Saat Ini”

2.4. Kerangka Analisis

